

## **Pengaruh Dan Strategi Manajemen Kolaborasi Masyarakat Dan Pemerintah Tahun 2019 (Pengembangan Goa Kiskendo Jatimulyo, Kulonprogo)**

**Dewi Indah<sup>1</sup>, Resky Eka Rachmandani<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas ISIPOL, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Email: dewiindahh@gmail.com

<sup>2</sup>Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Email: resky.eka.psc.19@mail.umy.ac.id

**Abstrak:** Kemajuan sektor pariwisata tidak terlepas dari adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Jalan terbaik yang dilakukan akan memberikan hasil yang baik jika masyarakat mencari strategi dan manajemen daripada kolaborasi antara pemerintah. Maka dari itu akan terlihat pengaruh yang besar dari proses pengembangan Goa Kiskendo di Desa Jatimulyo, Kabupaten Kulonprogo. Paper ini membahas tentang Pengaruh dan strategi manajemen kolaborasi masyarakat dan pemerintah pada tahun 2019 pada pengembangan Goa Kiskendo. Metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan teknik analisis data secara mendalam melalui pendekatan kualitatif secara deskriptif. Hasil yang didapat yaitu akan merujuk pada struktur jaringan dan komitmen terhadap tujuan didorong kepercayaan antar pelaku. Akan terlihat dalam tata kelola, sehingga dapat memiliki akses terhadap otoritas. Maka dari itu diperlukan sharing informasi dan pembagian tanggungjawab. Tidak lupa dengan pembagian tanggungjawab dan akses sumber daya yang ada. Sehingga akan terlihat pengaruh besar yang mendorong kolaborasi masyarakat dan pemerintah untuk mengembangkan Wisata Goa Kiskendo, Jatimulyo, Kulonprogo.

**Kata kunci:** Pengaruh, Strategi, Kolaborasi.

**Abstract:** *The progress of the tourism sector is inseparable from the collaboration between the community and the government. The best way to do this will give good results if the community seeks strategy and management rather than cooperation between governments. Therefore, there will be a significant influence on the process of developing Goa Kiskendo in Jatimulyo, Kulonprogo. This paper aims the importance and management strategy of community and government collaboration in 2019 on the development of Kiskendo Cave. The method used is to use in-depth data analysis techniques through a descriptive qualitative approach. The results obtained will refer to the network structure and commitment to the goal-driven by trust between actors. Will be seen in governance so that they can have access to authority. Therefore it is necessary to share information and share responsibility. Do not forget the division of duties and access to existing resources. So that it will look a significant influence that encourages community and government collaboration to develop Tourism in Goa Kiskendo, Jatimulyo, Kulonprogo.*

**Keywords:** *Influence, Strategy, Collaboration*

### **Article History:**

*Received : 2020-01-20*

*Revised : 2020-02-18*

*Accepted : 2020-03-14*

## **PENDAHULUAN**

Pengembangan pariwisata, teori kolaborasi dan teori pemberdayaan masyarakat serta strategi manajemen yang cocok dalam proses *collaborative governance* pengembangan pariwisata dan kolaborasi untuk melihat keberhasilan dalam sebuah kolaborasi. Pemberdayaan masyarakat digunakan karena adanya kolaborasi pasti dilakukan oleh beberapa pihak dan kolaborasi yang dilakukan ini mengenai pengembangan obyek wisata yang beradadi pemukiman masyarakat sehingga adanya keterlibatan masyarakat yang juga diberdayakan oleh pemerintah. Namun, pada awal 1980-an organisasi sektor publik juga mulai menggunakan konsep dan teknik manajemen strategis. Saat ini, manajemen strategis adalah umum di sektor publik di banyak negara dan di berbagai tingkatan pemerintahan (Johnsen, 2015). Sehingga, terlepas dari

program pelatihan yang semakin canggih dan penelitian akademis yang sangat canggih tentang konten, proses, opsi, dan tindakan strategis, efektivitas strategi publik masih menjadi sumber kontroversi besar (Mazouz & Rousseau, 2016). Ini menunjukkan bahwa, meskipun kegagalan aktual dalam memberikan integrasi kebijakan, strategi SD menandai langkah maju (konseptual) yang penting dalam kontroversi mengenai cara yang tepat dan tujuan strategi di sektor publik (Steurer, 2007). Ansel dan Grash (2012) mengatakan bahwa kolaborasi diartikan menjadi 2 arti yaitu kolaborasi dalam arti normative dan kolaborasi dalam arti proses.

Kolaborasi dalam arti proses dapat diartikan sebagai cara mengatur secara konstitusional, sedangkan dalam arti normative adalah sebuah aspirasi untuk mewujudkan suatu interaksi dalam kerjasamanya (Fairuza, 2019). Pihak yang berkolaborasi memiliki visi dan tujuan yang sama untuk diwujudkan bersama-sama. Dalam kolaborasi terdapat 2 lembaga atau lebih yang terlibat dan adanya perjanjian tertulis mengenai kerjasama yang dilakukan. Tujuan bersama ditujukan untuk memberi pelayanan public dan sama-sama bertanggung jawab pada resiko yang ada (Udiani, 2016). Bentuk perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, yang dilakukan secara sukarela dengan tujuan berlibur, atau tujuan lain seperti mencari nafkah, mengunjungi tempat tertentu untuk keperluan pribadinya (Zaenuri, 2014). Para ahli bidang pembangunan dan pengembangan pariwisata berpendapat yang dikutip dari Nyoman S. Pendit dimana dalam pengembangan pariwisata memerlukan beberapa syarat sebagai penentu dalam pengembagannya, diantara lain: faktor alam, sosial budaya, sejarah, agama dan fasilitas (Putri, 2015). Pemberdayaan merupakan suatu perubahan yang akan membentuk kemandirian dan partisipasi. Dimana individu yang terlibat dalam mengambil keputusan, sedangkan komunitas berhubungan dengan dampak keterlibatan. Serta organisasi sebagai mediator yang bertugas memfasilitasi kegiatan yang terlibat di komunitas (Iqbal, Suhaeti, Basuno, & Suradisastra, 2010).

Pengembangan obyek wisata dilakukan untuk mengembangkan potensi yang ada di daerah tersebut. Seperti yang dilakukan di Perbukitan Menoreh pada saat ini Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo sedang mengambangkan potensi alam yang dimiliki daerah tersebut. Adanya pengembangan ini ditujukan untuk meningkatkan pengunjung obyek wisata tersebut dari tahun ke tahun. Pengembangan suatu obyek wisata tidak bisa dilakukan hanya dengan 1 pihak, perlu adanya kerjasama yang dilakukan agar pengembangan yang dilakukan bisa maksimal. Heritage (2000) mengatakan bahwa kolaborasi adalah kegiatan bekerja bersama khususnya dalam penyatuan pemikiran satu sama lain untuk mewujudkan tujuan bersama. Goa Kiskendo merupakan salah satu obyek wisata yang ada di perbukitan menoreh. Obyek wisata ini merupakan obyek wisata berbasis sejarah dan minat khusus. Pengembangan Goa Kiskendo dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Kolaborasi dilakukan agar pengembangannya bisa dilakukan secara maksimal. Pihak yang terlibat dalam pengembangan adalah Dinas Pariwisata Kulon Progo dan masyarakat yang tergabung dalam Pokdarwis. Maka pada penelitian ini kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama dalam pengembangan obyek wisata Goa Kiskendo.

Tujuan dari pengembangan obyek wisata ini adalah untuk mengetahui pengembangan obyek wisata yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat guna meningkatkan peningkatan pengunjung dan mengembangkan potensi daerah. Goa Kiskendo merupakan obyek wisata goa yang terkenal di Kabupaten Kulon Progo, obyek wisata ini merupakan obyek wisata sejarah yang didalamnya memiliki nilai-nilai sejarah. Tahun 2014-2017 terdapat kenaikan dan penurunan jumlah pengunjung di Goa Kiskendo, berdasarkan data jumlah pengunjung dari Dinas Pariwisata Kulon Progo pada tahun 2014-2015 terapat kenaikan pengujung yang cukup signifikan, namun pada tahun 2016-2017 jumlah pengunjung di Goa Kiskendo mengalami penurunan yang cukup.

**Tabel 1. Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Goa Kiskendo Tahun 2014-2017**

Tahun	Jumlah Pengunjung
2014	10.043 Orang
2015	15.710 Orang
2016	14.783 Orang
2017	12.556 Orang

*(Sumber: Dinas Pariwisata Kulon Progo, 2019)*

Berdasarkan data yang dipaparkan diketahui adanya penurunan pengunjung dari tahun 2015-2017, adanya penurunan pengunjung disebabkan oleh beberapa faktor yang ada. Maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan obyek wisata Goa Kiskendo dalam meningkatkan jumlah pengunjung di setiap tahunnya serta untuk mengetahui sejauh mana kolaborasi yang telah dilakukan pemerintah dan masyarakat. Pengembangan suatu obyek wisata tidak hanya dilakukan oleh pemerintah namun perlu adanya kerjasama dengan masyarakat yang ada di daerah Serta adanya keseimbangan dalam pembangunan infrastruktur yang menjadi point penting dalam pengembangannya. Pengembangan obyek wisata ini juga didukung dengan pengembangan potensi yang ada didaerah masing-masing sebagai bukti bahwa daerah tersebut memiliki potensi yang berkualitas. Pengenalan potensi desa seperti adanya makanan khas dari daerah tersebut dan adanya keanekaragaman alam yang membuat suatu obyek wisata mempunyai daya tarik masing masing. Adanya makanan khas juga sebagai faktor pendukung suatu obyek wisata akan dikenal di masyarakat luas maupun mancanegara. Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, penelitian ini berfokus pada strategi manajemen dalam kolaborasi antara masyarakat Desa Jatimulyo dan pemerintah dalam mengembangkan obyek wisata serta mengelola obyek wisata Goa Kiskendo serta meningkatkan minat masyarakat terhadap obyek wisata sejarah.

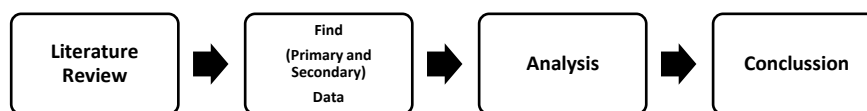
Maka dari itu, pengembangan suatu obyek perlu adanya kerjasama antara pihak yang memiliki peranan khusus seperti kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat daerah sekitar. Adanya kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat memiliki tujuan untuk menaikkan jumlah pengunjung dari tahun ke tahun serta mengenalkan suatu potensi daerah ke jenjang yang lebih luas (Umira Dewi, Fandeli, & Baiquni, 2013). Pemerintah Daerah Kulon Progo pada saat ini sedang gencarnya mengembangkan potensi wisata yang ada di Perbukitan Menoreh, salah satunya adalah Goa Kiskendo Pada pengembangan ini Pemerintah bekerja sama dengan masyarakat guna memberdayakan masyarakat yang ada serta mengembangkan potensi alam. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori De Seve (2007).



**Gambar 1. De Seve Collaborative Governance and Strategy Process**

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini lokasi yang diambil oleh peneliti adalah Goa Kiskendo yang berlokasi di Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo. Pada penelitian ini unit analisa pada pengambilan data yang dibutuhkan adalah Dinas Pariwisata Kulon Progo, Masyarakat Desa Jatimulyo. Dalam mencari data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 4 tahap.



**Gambar 2. Alur Penelitian**

*(Sumber: Peneliti, 2019)*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Strategi Manajemen Dalam Collaborative Governance**

#### **Struktur Jaringan**

Pada kolaborasi yang dilakukan Dinas Pariwisata Kulon Progo dan masyarakat struktur jaringan yang terkait hanyalah dua pihak yaitu Dinas Pariwisata Kulon Progo dan masyarakat yang tergabung dalam Pokdarwis. Hal ini dibuktikan dengan adanya perjanjian kerjasama (MoU) nomor 556/19/XII/TAHUN 2015 tentang kerjasama pelaksanaan pemungutan retribusi masuk tempat rekreasi Goa Kiskendo Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo. Pada kolaborasi ini tidak adanya sangkut paut dari pihak swasta. Pemerintah memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar dengan cara berkolaborasi dalam pengembangan Goa Kiskendo. Jaringan pada kolaborasi ini baik karena masyarakat ingin mengembangkan Goa Kiskendo tanpa merubah atau menghilangkan nilai sejarah yang ada di area goa.

Masyarakat juga ingin hasil dari pengembangan Goa Kiskendo ini dapat dinikmati oleh anak cucu di masa yang akan datang. Adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat juga tertulis pada perjanjian kerjasama sehingga kerjasama yang terjalin antara kedua pihak jelas statusnya. Struktur jaringan pada kolaborasi ini kuat, karena pemerintah dan masyarakat tetap berkoordinasi dalam melakukan pengembangan Goa Kiskendo tanpa dicampur tangani pihak swasta. Tidak adanya campur tangan swasta juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya adalah sulitnya berkembang secara maksimal karena minimnya pendanaan dalam pengembangannya. Kelebihan dari tidak adanya pihak swasta adalah dapat menjaga keaslian dari obyek wisata Goa Kiskendo itu sendiri. Kedua pihak sama-sama memiliki alasan yang kuat untuk tidak bekerja sama dengan pihak swasta sehingga kerja sama yang dilakukan sampai saat ini dapat bertahan dengan baik.

#### **Komitmen Terhadap Tujuan**

Komitmen terhadap tujuan yang merupakan hubungan aktif antara individu dan sebuah organisasi yang mana hubungan tersebut mengakibatkan individu atas kehendak sendiri yang bersedia memberikan sesuatu demi merefleksikan dukungannya bagi tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Proses atau tahap ini adalah inti daripada membangun kepercayaan, saling menghormati, pemahaman bersama dan komitmen dalam membangun proses (Arianti & Satlita, 2018). Dalam komitmen terdapat perjanjian dalam menjalankan suatu kolaborasi dan mau memberikan sesuatu terhadap kolaborasi yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini antara pihak Dinas Pariwisata Kulon Progo dan masyarakat sama-sama memiliki komitmen yang kuat dalam mengembangkan Goa Kiskendo, dalam pengembangannya baik pihak pemerintah maupun pihak masyarakat sama-sama mengembangkan fasilitas yang ada di Goa Kiskendo, masyarakat berkomitmen penuh dalam pengembangannya karena Goa Kiskendo

merupakan peninggalan sejarah yang perlu dilestarikan agar anak cucu dikemudian hari bisa menikmati keindahan Goa Kiskendo. Pada pengembangan ini pihak pemerintah juga telah mengembangkan beberapa fasilitas untuk menunjang kenyamanan pengunjung. Pengembangan tersebut adalah bukti dari komitmen dari pemerintah dan masyarakat terhadap pengembangan Goa Kiskendo yang kuat.

Komitmen antara Dinas Pariwisata Kulon Progo dan masyarakat sama-sama kuat. Pemerintah terus meningkatkan fasilitas yang ada untuk menunjang kenyamanan pengunjung dan pemerintah ingin obyek wisata sejarah ini tidak kalah dengan obyek wisata lain. Komitmen yang ada di masyarakat juga kuat karena masyarakat ingin terus menjaga peninggalan sejarah yang ada di daerahnya sehingga masyarakat sangat berkomitmen dalam pengembangannya.

### ***Rasa Percaya Antar Pelaku***

Didalam sebuah kerjasama antara beberapa pihak perlu adanya sikap saling percaya antara satu pihak dan pihak lainnya, serta harus ditanamkan kerjasama yang profesional yang akan mewujudkan tujuan bersama. Adanya kepercayaan yang kuat akan memudahkan dalam hal komunikasi dan mempermudah dalam proses kolaborasi (Noerhartati, Widiartin, Maslihah, & Karyanto, 2018). Rasa percaya antar pelaku dalam kolaborasi dibuktikan dalam adanya pola komunikasi yang terlibat antara kedua pelaku. Rasa percaya antar pelaku dapat diukur dengan adanya komunikasi, pada kolaborasi yang dilakukan Dinas Pariwisata Kulon Progo pola komunikasi yang baik dilakukan dengan cara adanya pertemuan di setiap bulannya untuk menyerahkan hasil retribusi selama 1 bulan olah masyarakat. Adanya monitoring di setiap bulannya juga dilakukan pihak Dinas Pariwisata Kulon Progo untuk mengetahui perkembangan pengunjung di setiap bulannya.

Group chat juga digunakan untuk menjalankan komunikasi antara kedua pihak, dengan adanya group chat makan informasi yang didapat lebih mudah. Pihak Dinas Pariwisata Kulon Progo juga melakukan kunjungan ke obyek wisata Goa Kiskendo untuk mengetahui perkembangan sekaligus untuk melakukan penunjuaan di setiap bulannya. Adanya pertemuan di setiap bulannya antara pihak pemerintah dan masyarakat maka akan tercipta komunikasi yang baik dan akan memperkuat rasa percaya antar pelaku. Dengan adanya pertemuan rutin dan monitoring yang dilakukan setiap bulannya maka rasa percaya antara kedua pihak bisa dikatakan kuat dengan pola komunikasi yang teratur. Pola komunikasi yang dilakukan Dinas Pariwisata Kulon Progo dan masyarakat berjalan dengan baik. Dengan adanya pertemuan rutin yang dilakukan setiap satu bulan sekali yang bertempat di kantor Dinas Pariwisata Kulon Progo, kunjungan rutin dan adanya komunikasi yang dilakukan di group chat menggunakan media aplikasi whatsapp membuat rasa percaya antar pelaku menjadi kuat. Serta tidak adanya hal yang ditutupi antara kedua pihak.

### ***Kejelasan dalam Tata Kelola***

Agustinus dan Ariya mengatakan bahwa adanya suatu kepastian organisasi yang digunakan sebagai tanggung jawab dalam mengimplementasikan tujuan yang ada. Dijelaskan secara jelas dimana pengelolaan pihak yang bekerjasama harus dibedakan pihak yang termasuk anggota atau yang bukan anggota. Adanya kepastian dalam kolaborasi sehingga tidak ada batasan antara pihak yang ingin berkolaborasi, namun tetap sesuai dengan kebutuhan. Kepastian tata kelola dalam suatu kerjasama yang dilakukan perorangan atau kelompok diperlukan sebagai patokan dalam menjalankan tanggungjawab dalam mengimplementasikan tujuan yang telah ditetapkan (Fatmawati, 2016). Pola komunikasi yang dilakukan Dinas Pariwisata Kulon Progo dan masyarakat berjalan dengan baik. Dengan adanya pertemuan rutin yang dilakukan setiap satu bulan sekali yang bertempat di kantor Dinas Pariwisata Kulon Progo, kunjungan rutin dan adanya komunikasi yang dilakukan di group chat menggunakan

media aplikasi whatsapp membuat rasa percaya antar pelaku menjadi kuat. Serta tidak adanya hal yang ditutupi antara kedua pihak.



**Gambar 3. Struktur Pengelolaan Objek Wisata**

*(Sumber: Pengelola, 2019)*

Pada kolaborasi pengembangan Goa Kiskendo pihak yang terlibat dalam pengembangannya yaitu Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pariwisata Kulon Progo, Masyarakat yang tergabung dalam pokdarwis dan Pemerintah Desa Jatimulyo. Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta selaku pemilik lahan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kulon Progo dan masyarakat terkait dengan pengembangannya, terdapat hubungan antara ketiga pihak yang saling berkoordinasi dalam pengembangan Goa Kiskendo. Sedangkan antara masyarakat dan Pemerintah Desa Jatimulyo terdapat koordinasi terkait pengembangan sumber daya manusia dengan adanya pelatihan dan pembinaan terkait dengan pengelolaan Goa Kiskendo. Kegiatan pembinaan dan pelatihan yang dilakukan Pemerintah Desa Jatimulyo setiap 2-3 tahun sekali. Pelatihan yang diajarkan seperti pelatihan pembuatan kerajinan, pelatihan manajemen, pelatihan pemandu dan pembinaan sadar wisata dilakukan Pemerintah Desa Jatimulyo agar dalam mengelola Goa Kiskendo masyarakat memiliki potensi yang baik dan dapat mengembangkannya secara mandiri di kemudian hari.

Pada pengembangan Goa Kiskendo ini tidak adanya pihak swasta yang terlibat karena pihak Pemerintah ingin memberayakan masyarakat setempat. Adanya kejelasan tata kelola dalam mengembangkan Goa Kiskendo ini memudahkan koordinasi antara pihak yang terlibat. Pada kolaborasi ini struktur organisasi pada pengembangan Goa Kiskendo jelas, terdapat struktur yang jelas pada pihak yang berkolaborasi sehingga dalam pelaksanaannya menjadi lebih terstruktur.

### **Akses Terhadap Otoritas**

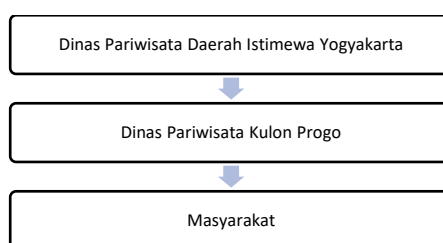
Adanya akses terhadap pihak yang berwenang untuk mengetahui tindakan yang sedang dilakukan serta ketentuan yang akan dilakukan dalam kolaborasi dan adanya tahapan yang jelas dalam pelaksanaannya agar dapat diterima luas. Adanya pembagian tugas dan kewajiban antara setiap pihak yang terlibat dan telah disesuaikan dengan kesepakatan bersama (Hsu, Tan, & Mohamad Zailani, 2016).

Kolaborasi yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam pembagian tugasnya dilakukan secara terstruktur dari pihak yang tertinggi ke pihak dibawahnya. Pihak Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pemilik lahan Goa Kiskendo menyerahkan sebagian lahannya kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo untuk mengelola serta mengembangkan obyek wisata tersebut yang tertulis di berita acara serah terima sebagian urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan.

Kemudian Dinas Pariwisata Kulon Progo yang bekerjasama dengan masyarakat memberikan tugas kepada masyarakat sebagai petugas retribusi tiket masuk dan parkir dan

petugas kebersihan. Pemberin tugas dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kulon Progo sebagai bukti adanya kerjasama yang dilakukan. Selain pembagian tugas yang diberikan kepada masyarakat, terapat pembagian hasil dana retribusi sebesar 22,5% bagi masyarakat yang terlibat yang ditulis dalam Peraturan Bupati no 27 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Masyarakat yang tergabung dalam kolaborasi ini selain menjadi petuas retribusi dan kebersihan, masyarakat juga melakukan pengembangan fasilitas yang ada di Goa Kiskendo yang dalam pengembangannya tetap dibawah pengetahuan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Pariwisata Kulon Progo. Pengembangan yang dilakukan masyarakat bertujuan untuk memberi kenyamanan pengunjung serta dapat menjadi referensi dalam berwisata dengan fasilitas yang baik. Fasilitas yang dikembangkan dapat dijadikan sebagai paket wisata yang ada di Desa Jatimulyo. Dengan adanya paket wisata diharapkan akan apat meningkatkan pengunjung di setiap tahunnya.



**Gambar 4. Struktur Akses pada Pengembangan Goa Kiskendo**

*(Sumber: Dinas Pariwisata Kulonprogo, 2019)*

Berdasarkan struktur tersebut diketahui bahwa akses dalam pemberian tugas pada pengembangan Goa Kiskendo ini dilakukan secara terstruktur dan jelas. Pihak Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta juga selalu memonitoring kinerja dari Dinas Pariwisata Kulon Progo dan masyarakat dalam pengembangannya. Pada bagan tersebut diketahui bahwa pemerintah berperan dalam memperomosisikan serta mngadakan kegiatan yang ada di Goa Kiskendo, sedngkan masyarakat berperan sebagai pengelola yang bertugas di lapangan. Kedua pihak memiliki tugas yang sesuai dengan kedudukannya sehingg kolaborasi yang terjalin dapat dilakukan secara maksimal.

### ***Berbagi Informasi***

Berbagi Informasi yang dikatakan Ladjamudin (2005) mengatakan bahwa adanya keterbukaan dalam akses data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih baik sehingga mudah untuk diterima. Dalam sebuah kolaborasi perlu adanya media yang berfungsi untuk mencari informasi bagi pihak yang bertugas sehingga tidak adanya kesulitan dalam mengakses. Fahrudin dan Riasti (2011) memastikan bahwa Tidak adanya kerahasiaan antara pihak yang terlibat membuat informasi mudah diketahui oleh semua pihak (Astuti, 2013). Pada kolaborasi ini pemerintah membagikan informasi pada dua pihak melalui dua jalur berbeda, yang pertama antara pemerintah dan masyarakat melalui group chat dan adanya pertemuan rutin yang dilakukan pihak pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya group chat dan pertemuan rutin maka dalam mengakses informasi akan lebih mudah dan tidak ada informasi yang ditutup-tutupi maka pembagian informasi bisa dikatakan transparan. Dengan adanya group chat maka akan mempermudah komunikasi yang dilakukan tanpa harus bertatap muka.

Cara kedua dalam pembagian informasi dari pemerintah ke masyarakat yaitu melalui media sosial. Dimana pemerintah memiliki media sosial berupa Website, Instagram, dan Facebook. Media sosial yang dimiliki Dinas Pariwisata Kulon Progo digunakan dalam memberikan informasi terkait Goa Kiskendo sehingga masyarakat menjadi lebih mudah untuk

mengetahui informasi terkait Goa Kiskendo. Website yang dimiliki Dinas Pariwisata Kulon Progo berisi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata yang ada di Kulon Progo terutama Goa Kiskendo. Pada media sosial Instagram berisi mengenai kegiatan yang dilakukan Dinas Pariwisata Kulon Progo dan didalamnya terdapat promosi obyek wisata terutama Goa Kiskendo. Serta media sosial Facebook yang didalamnya terdapat info mengenai Dinas Pariwisata Kulon Progo dan mempromosikan obyek wisata Goa Kiskendo.

Berdasarkan pemaparan tersebut Dinas Pariwisata Kulon Progo melalui group chat dan adanya media sosial yang dapat diakses oleh masyarakat luas, maka dalam berbagi informasi Dinas Pariwisata Kulon Progo sudah dikatakan transparan. Peran media sosial untuk mempromosikan suatu obyek wisata sangat besar dimana media sosial memiliki kekuatan dalam menarik perhatian. Dengan begitu Dinas Pariwisata Kulon Progo aktif dalam memberikan informasi terbaru mengenai Goa Kiskendo menggunakan media sosial yang dimilikinya.

### ***Pembagian Tanggungjawab***

Pembagian akuntabilitas dan tanggungjawab dimana Mark Boven (2009) mengatakan adanya kewajiban dalam melaksanakan tanggung jawab dengan kewajiban yang harus dilakukan yang digunakan sebagai penjelasan diakhirnya. Pembagian tanggungjawab bagi semua pihak yang terlibat dalam hal penataan suatu pekerjaan yang mana setiap anggota nantinya memiliki tanggungjawab dalam menjalankan sebuah kerjasama. Seperti halnya dengan mempengaruhi banyak komponen proses, pemimpin bisnis di negara-negara berkembang juga harus memperkuat orientasi eko-strategis mereka dan mengembangkan praktik bisnis yang berkelanjutan untuk meningkatkan penerapan timbal balik, yang dapat membantu mereka memenuhi tanggung jawab lingkungan mereka (Hsu et al., 2016).

Pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat diukur dengan adanya hasil dan target yang telah ditentukan. Target antara pemerintah dan masyarakat di setiap tahunnya dapat meningkatkan jumlah pengunjung dari tahun ke tahun. Upaya Dinas Pariwisata Kulon Progo dalam meningkatkan jumlah pengunjung dengan mengadakan beberapa acara yang dilakukan di Goa Kiskendo, event yang dilakukan diantaranya acara sendratari Sugriwa Subali yang dilakukan di area Goa Kiskendo, yang juga diadakan acara bule mengajar serta vlog competition. Dinas Pariwisata Kulon Progo juga mengadakan acara Menoreh Tourism Festival 2018 yang dilakukan di Goa Kiskendo. Upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi target yang telah ditetapkan dengan cara pengembangan fasilitas yang ada. Pihak pemerintah telah membangun beberapa fasilitas seperti pagar, mini theater, gazebo dan juga toilet. Masyarakat juga mengembangkan fasilitas seperti outbond dan penyewaan alat susur goa dan alat untuk camping. Adanya pengembangan fasilitas yang dilakukan juga sebagai bukti komitmen yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengemabangkan Goa Kiskendo serta upaya dalam mencapai target yang ada.

***Tabel 2. Jumlah Pengunjung di Goa Kiskendo Tahun 2014-2018***

Tahun	Jumlah Pengunjung
2014	10.043 Orang
2015	15.710 Orang
2016	14.783 Orang
2017	12.556 Orang
2018	12.107 Orang

*Sumber: Dinas Pariwisata Kulon Progo*

Adanya pengembangan fasilitas seperti pagar, gazebo, toilet, mini theater yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kulon Progo dan pengembangan yang dilakukan oleh masyarakat seperti pengembangan area outbond, camping ground dan penyewaan perlengkapan susur goa dan



camping sebagai bukti dari komitmen yang kuat belum bisa meningkatkan jumlah pengunjung di Goa Kiskendo. Adanya pengembangan fasilitas yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sebagai bukti dari komitmen yang kuat belum bisa meningkatkan jumlah pengunjung di Goa Kiskendo. Penurunan pengunjung selama 3 tahun terakhir disebabkan oleh beberapa faktor seperti, akses infrastruktur yang sulit, area obyek wisata yang sulit untuk ditempuh, cuaca yang tidak menentu, munculnya banyak obyek wisata baru yang lebih menarik dan kurangnya minat masyarakat mengenai obyek wisata sejarah.

### **Akses Terhadap Sumber Daya**

Akses terhadap sumber daya yang dikatakan Nawawi (2007) dimana akses berupa aset yang berfungsi sebagai modal yang dapat diwujudkan dalam pencapaian tujuannya. Perlu adanya kecukupan dalam hal sumber daya yang meliputi manusia, teknis, keuangan dan lain-lain yang digunakan dalam kolaborasi. Maka dari itu anggota memiliki hak akses ke sumber daya produk bersama atau yang akan mereka saling bagi dan kebijakan yang telah disepakati secara bersama untuk menentukan akses terhadap sumber daya tersebut (Prabawa, 2017). Pada kolaborasi ini akses terhadap sumber daya terbagi atas 2 bagian, yaitu infrastruktur dan sumber daya manusia. Pengembangan infrastruktur dalam kolaborasi ini berupa pengembangan fasilitas yang menunjang kebutuhan pengunjung seperti toilet, lahan parkir, serta petunjuk jalan. Adanya infrastruktur yang dibangun sebagai hasil dari pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Pengembangan sumber daya manusia juga dilakukan agar masyarakat yang terkitab sebagai pengelola memiliki kualitas yang baik. Pada kolaborasi ini sumber daya manusia dikembangkan oleh Pemerintah Desa Jatimulyo, dimana Pemerintah Desa mengadakan kegiatan pelatihan dan pembinaan bagi masyarakat yang tergabung dalam pokdarwis. Pelatihan dan pengembangan potensi sumber daya manusia seperti pelatihan manajemen, pelatihan kerajinan dan pelatihan pemandu wisata. Dengan adanya pelatihan tersebut masyarakat akan memiliki kemampuan dalam mengelola obyek wisata baru dan dapat mengembangkan secara mandiri.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan indikator dalam mengukur kolaborasi yang dilakukan pemerintah dan masyarakat. Kolaborasi yang dilakukan sudah cukup baik namun dalam meningkatkan jumlah pengunjung disetiap tahunnya masih kurang. Penurunan pengunjung dalam 3 tahun terakhir juga disebabkan oleh beberapa faktor seperti infrastruktur yang kurang, cuaca yang tidak menentu serta adanya perkembangan wisata baru yang lebih menarik perhatian. Strategi lainnya yaitu di bentuk secara khusus metode-metode terbaru agar dapat menarik simpati yang tinggi terhadap turis maupun pengunjung yang akan datang.

Memasuki era digitalisasi saat ini, tentu pengelola wisata harus menggenarkan proses kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi yang akan digunakan saat ini. Pengembangan sektor wisata tidak terlepas jika unsur-unsur yang mengelola selalu memberikan inovasi berupa pembaruan atau penyegaran pada sektor pendukung dengan melihat serta memperhatikan aspek yang sesuai digunakan pada objek wisata tersebut agar objek pariwisata ini memiliki kesan yang baik bagi para pengunjungnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arianti, D., & Satlita, L. (2018). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Konservasi Mangrove Baros di Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. *Jurnal Adinegara*, 7(6), 809–827. Retrieved from <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/adinegara/article/download/13177/12729>
- Astuti, P. D. (2013). Sistem Informasi Penjualan Obat Pada Apotek Jati Farma Arjosari. *Indonesian Journal on Computer Science - Speed (IJCSS) 16 FTI UNSA Vol 10 No 1 – Mei*

- 2013 - *Ijcss.Unsa.Ac.Id*, 10(1), 142–147.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3112/speed.v3i4.1217>
- Fairuza, M. (2019). *Kolaborasi antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata ( Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi )*. 5, 1–13.
- Fatmawati, E. (2016). *Merajut inovasi pustakawan perguruan tinggi untuk mewujudkan sdm perpustakaan berkualitas*. (2012).
- Hsu, C. C., Tan, K. C., & Mohamad Zailani, S. H. (2016). Strategic orientations, sustainable supply chain initiatives, and reverse logistics: Empirical evidence from an emerging market. *International Journal of Operations and Production Management*, 36(1), 86–110. <https://doi.org/10.1108/IJOPM-06-2014-0252>
- Iqbal, M., Suhaeti, R., Basuno, E., & Suradisastra, K. (2010). Kaji Tindak (Action Research) Pemberdayaan Masyarakat Pertanian Wilayah Tertinggal. *Kumpulan Artikel*, 978–979.
- Johnsen, Å. (2015). Strategic management thinking and practice in the public sector: A strategic planning for all seasons? *Financial Accountability and Management*, 31(3), 243–268. <https://doi.org/10.1111/faam.12056>
- Mazouz, B., & Rousseau, A. (2016). Strategic management in public administrations: a results-based approach to strategic public management. *International Review of Administrative Sciences*, 82(3), 411–417. <https://doi.org/10.1177/0020852316655522>
- Noerhartati, E., Widiartin, T., Maslihah, M., & Karyanto, N. W. (2018). The development of market segmentation of sorghum products as functional beverages. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 434(1), 0–6. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/434/1/012169>
- Prabawa, I. W. S. W. (2017). Online Marketplace Dan Tourist Virtual Communities Di Industri Pariwisata (Inovasi Disruptive Dalam Industri Pariwisata) I Wayan Sukma Winarya Prabawa Program Studi Destinasi Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali Surel : sukma.winarya259@gm. *Destinasi Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali*, 8(1), 39–46.
- Steurer, R. (2007). From government strategies to strategic public management: An exploratory outlook on the pursuit of cross-sectoral policy integration. *European Environment*, 17(3), 201–214. <https://doi.org/10.1002/eet.452>
- Udiani, N. (2016). *Kolaborasi Perencanaan ( Studi Kasus Pengembangan UMKM di Kabupaten Maros )*.
- Umira Dewi, M. H., Fandeli, C., & Baiquni, M. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2), 129–139. <https://doi.org/10.22146/kawistara.3976>
- Zaenuri, M. (2014). *Mengelola Pariwisata-Bencana: Perlunya Perubahan Paradigma Pengelolaan Pariwisata Dari Adaptive Governance Menuju Collaborative Governance*. 157–168.